

ABSTRAK

Irham Fauzan Abdullah (1225010075): *Respon Komunitas Arab Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Budaya Sunda di Purwakarta 2015 – 2020*

Kebijakan budaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada periode 2015–2020 berkembang dalam kerangka RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 yang dijabarkan melalui konsep *Purwakarta Berkarakter* dan *Salapan Langkah Ngawangun Nagri Raharja*. Kebijakan tersebut menempatkan budaya Sunda sebagai bagian dari pembangunan daerah melalui festival budaya, penataan ruang publik, dan pendidikan karakter berbasis budaya lokal. Pelaksanaannya berlangsung dalam masyarakat yang beragam, termasuk komunitas Arab Hadrami yang telah lama menjadi bagian dari sejarah sosial Purwakarta. Kondisi tersebut menjadi dasar penelitian untuk melihat hubungan antara kebijakan budaya, identitas etnis, dan nilai keagamaan.

Penelitian ini membahas sejarah komunitas Arab Hadrami di Purwakarta serta bentuk kebijakan budaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan respon komunitas Arab Hadrami terhadap kebijakan tersebut. Penelitian bertujuan menjelaskan landasan kebijakan budaya, menganalisis respon komunitas Arab Hadrami pada bidang festival budaya, ruang publik, dan pendidikan, serta menjelaskan hubungan antara identitas budaya, nilai keagamaan, dan kebijakan pemerintah daerah.

Penelitian menggunakan metode sejarah melalui heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan pendekatan etnohistoris. Data diperoleh dari arsip, peraturan daerah, dokumen perencanaan, pemberitaan sezaman, dokumentasi audiovisual, literatur ilmiah, serta wawancara dengan tokoh komunitas Arab Hadrami, pihak sekolah, Kementerian Agama, dan lembaga terkait. Analisis menggunakan teori strategi akulturasi John W. Berry.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon komunitas Arab Hadrami tidak seragam. Pada festival budaya dan ruang publik, kritik terutama diarahkan pada simbol, prioritas kebijakan, dan perbedaan penafsiran terhadap budaya, bukan pada budaya Sunda secara keseluruhan. Pada pendidikan, penerimaan relatif lebih luas karena dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah merespons dinamika tersebut dengan mempertahankan kebijakan, melakukan penyesuaian, memberikan penjelasan, dan memperkuat toleransi kehidupan beragama. Berdasarkan teori Berry, hubungan tersebut **cenderung menunjukkan integrasi yang bersifat selektif dan negosiatif**, yaitu mempertahankan identitas etnis dan keagamaan sambil tetap berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya daerah.